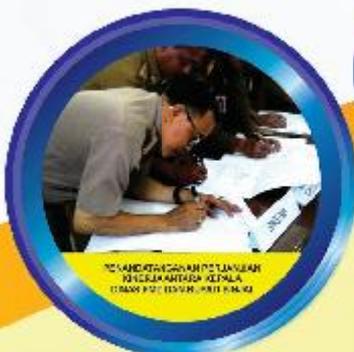




DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018

Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Kode Pos : 92616, e-mail: dispmd@sinjaikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja, LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 terdiri dari : Pendahuluan; Perencanaan & Perjanjian Kinerja; Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 (Delapan) indikator kinerja utama, ke 6 (Enam) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Februari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebanyak 8 (Delapan) indikator dari target sasaran telah memenuhi target, namun terdapat target yang tidak terealisasi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	11
2.1.1 Visi dan Misi	11
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	12
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	14
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	16
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.7 Rencana Anggaran Tahun 2018	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2018.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	47
Analisa Efisiensi.....	50
BAB IV. PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018.....	8
Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018.....	17
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	18
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018.....	19
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2018.....	20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018.....	23
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	48
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Grafik 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018.....	8
Grafik1.4 Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural	9
Grafik 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2018.....	53
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....	57
Lampiran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.....	62
Lampiran 4. Data Capaian Kinerja	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; **g. pemberdayaan masyarakat dan Desa**; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan dan Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas : a). Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanahkan pada Pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Pasal 5 Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

- (1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan/kelurahan;
3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai guna mendukung operasional perkantoran;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat desa/kelurahan;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

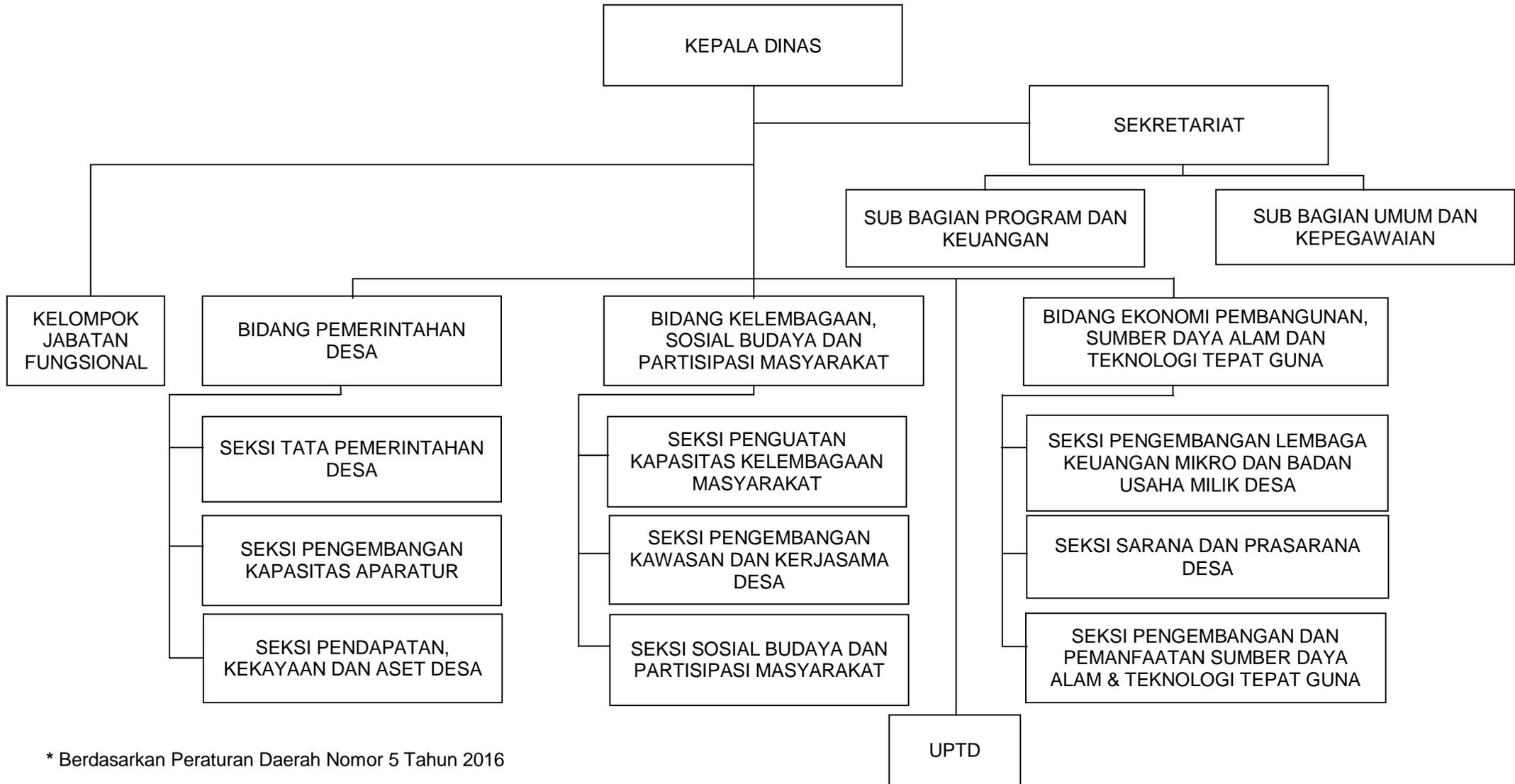
1.5.1. Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
 - Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa; dan
 - Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

1.6. Komposisi SDM Organisasi

Sumber daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2018 adalah 26 Orang.

1.6.1. Komposisi SDM berdasarkan Gender

Dari 26 jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 15 Orang Laki-laki dan 11 Orang Perempuan, berikut Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

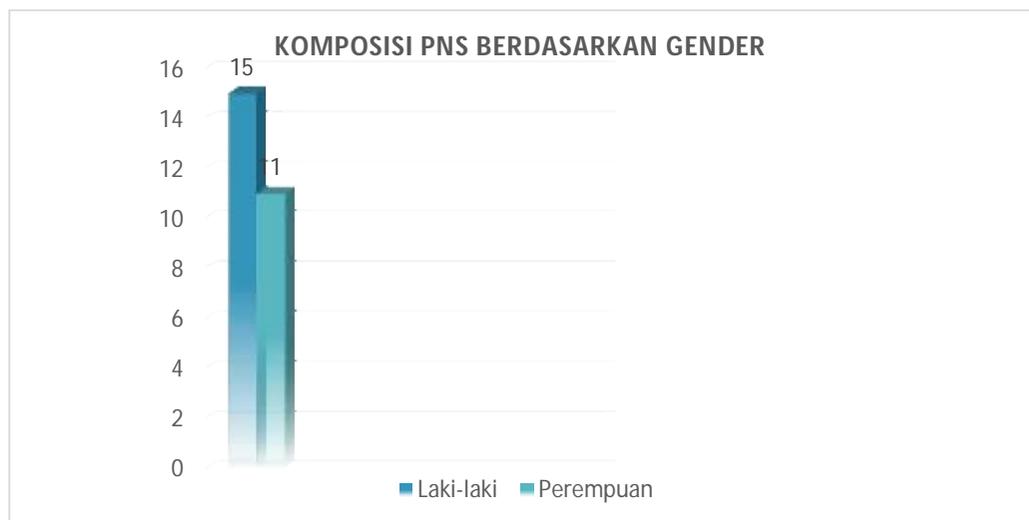
Tabel 1.1

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	15 Orang
2	Perempuan	11 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2018

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih banyak Laki-Laki dibandingkan dengan Perempuan.



Grafik 1.1.

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

1.6.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

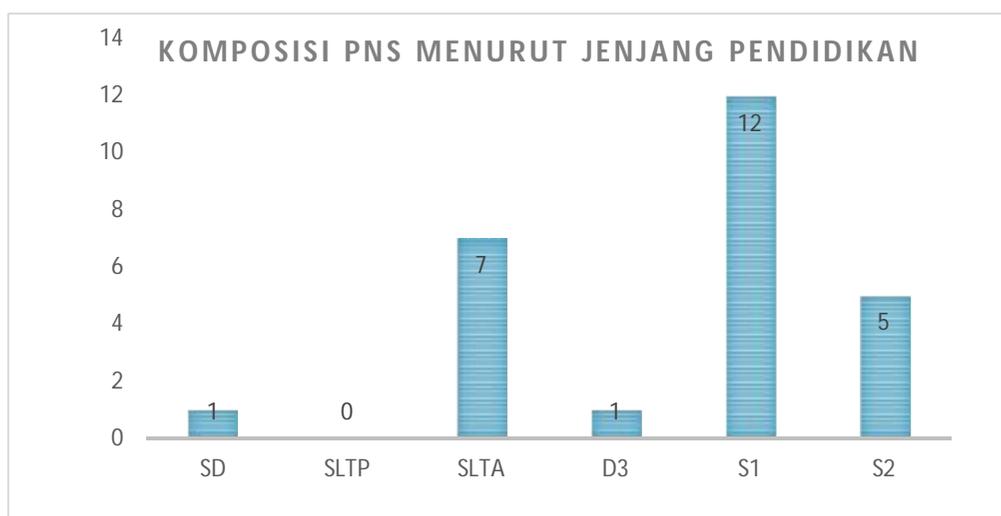
Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam menjalankan roda organisasi

Tabel 1.2
 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	SD	1 Orang
2	SLTP	- Orang
3	SLTA	7 Orang
4	D3	1 Orang
5	S1	12 Orang
6	S2	5 Orang
JUMLAH		26

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2018

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai mayoritas pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 13 Orang dan selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 Orang.



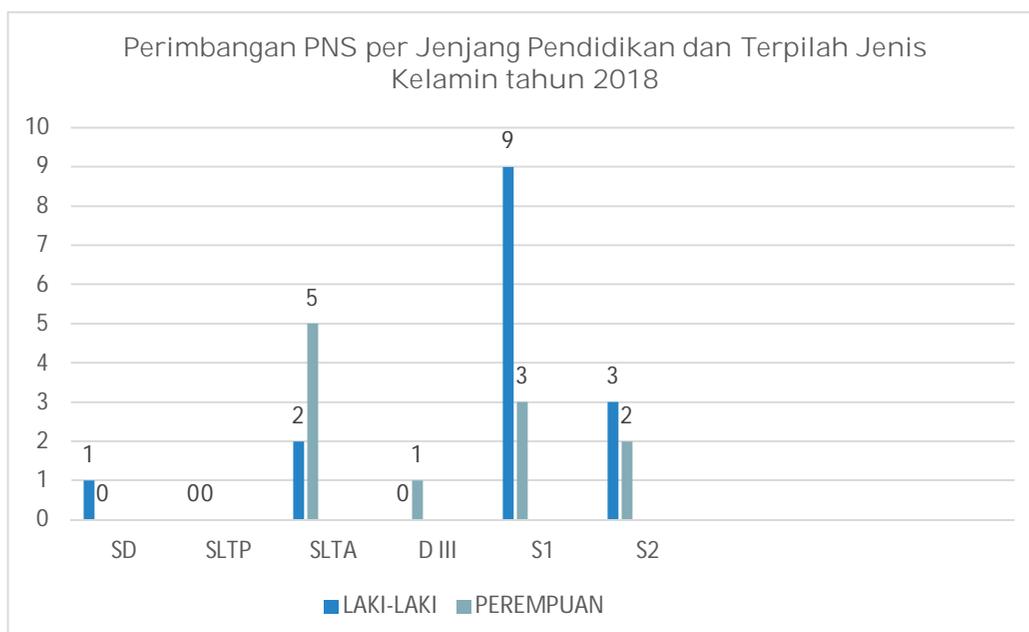
Grafik 1.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3
 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018

Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah	%
SD	Laki-Laki	1	3,84
	Perempuan	-	-
SLTP	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTA	Laki-Laki	2	7,69
	Perempuan	5	19,23
D3	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	1	3,84
S1	Laki-Laki	9	34,61
	Perempuan	3	11,53
S2	Laki-Laki	3	11,53
	Perempuan	2	7,69
JUMLAH		26	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2018

Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa secara umum dari semua jenjang pendidikan jumlah PNS Laki-laki lebih dominan dibanding PNS perempuan, kecuali pada jenjang pendidikan SLTA lebih banyak PNS perempuan daripada Laki-laki.



Grafik 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2018

1.6.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dari 26 Orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 9 Orang Laki-laki dan 6 Orang Perempuan yang menduduki jabatan baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV, berikut ini Gambar/Grafik Komposisi Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural.



Grafik 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural

1.6.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang memiliki usia yang cukup tua yang harus selalu terpelihara agar dapat mendukung operasional dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat. Nilai Aset yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2018 adalah Rp. 3.202.379.375,- terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp. 3.027.161.875,- dan asset lainnya Rp. 175.217.500,- berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 1.4
 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Perlengkapan	Jumlah (Satuan)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	3 Unit	
2	Rumah Dinas	1 Unit	
3	Kendaraan roda empat	1 unit	Operasional Kepala Dinas
4	Kendaraan roda dua	14 Unit	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner (AC) dan lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja.

1.7. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

Visi :

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah

**"Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Potensi Lokal"**

MISI :

Dalam memenuhi visi diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mencanangkan misi, yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.
2. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas.

2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- ❖ *Misi 1 Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia.*

Tujuan:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.

- ❖ *Misi 2 Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat*

Tujuan :

1. Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

- ❖ *Misi 3 Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.*

Tujuan :

1. mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.

- ❖ *Misi 4 Meningkatkan peran perempuan di pedesaan*

Tujuan :

1. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan

- ❖ *Misi 5 Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.*

Tujuan :

1. Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam.

- ❖ *Misi 6 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas.*

Tujuan :

1. Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	LPM	50	80
Tujuan 2. Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa	Terbentuknya Badan Usaha Ekonomi Desa di masing-masing Desa	BUMDesa	36	67
	Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Secara berkesinambungan	Lembaga Keuangan Mikro	21	21
Tujuan 3. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat	Jumlah masyarakat yang melaksanakan gotong royong dan partisipasi dalam pembangunan	Desa/ Kelurahan	80	80
Tujuan 4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan	Jumlah Lembaga PKK Aktif	TP. PKK	90	90
Tujuan 5 : Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan hasil inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Kelompok	7	13
Tujuan 6 : Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan pembangunan	Tata Kelola pemerintahan Desa yang baik	Desa	67	67

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- ❖ Tujuan 1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat

Sasaran :

1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas

- ❖ Tujuan 2 Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

- ❖ Tujuan 3 Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.

- ❖ Tujuan 4 Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan

Sasaran :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan

- ❖ Tujuan 5 Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam

Sasaran :

1. Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam

- ❖ Tujuan 6 Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Indikator 1 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa =80	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa =80
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	LPM	80 LPM	80 LPM
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Indikator 1 : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	67	67
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	LKM	21	21
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Indikator 1 : Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	%	23	23
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Indikator 1 : Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program pokok PKK	%	100	100
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Indikator 1 : Jumlah alat inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Alat	9	14
Sasaran 6 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Indikator 1 : Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata- rata provinsi	Desa	0	15

2.4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG
Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Program 1 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Program 2 : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Indikator 1 : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM=80; Pokja Posyandu Desa =80
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	LPM	80LPM
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Indikator 1 : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	67 BUMDesa
	Indikator 2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	LKM	21 LKM
Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan.	Indikator 1 : Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	%	23 %
Sasaran 4 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Indikator 1 : Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program pokok PKK	%	100%
Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Indikator 1 : Jumlah alat inovasi Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	Alat	3 Alat
Sasaran 6 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Indikator 1 : Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	Desa	15 Desa

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5
IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	Unit	Jumlah PKK; LPM dan Pokja Posyandu Desa yang aktif	Data PKK, LPM dan Pokja Posyandu Aktif
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	Total Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	Keputusan Bupati Sinjai tentang Pengesahan penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Sinjai
Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	Total Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Hasil Perhitungan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	Jumlah Hasil Perhitungan Lembaga Keuangan Mikro yang aktif
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	%	Jumlah Masyarakat yang melakukan Gotong Royong dibagi Jumlah Penduduk x 100%	Data Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	Jumlah Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dibagi Jumlah Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK x 100%	Data Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	Jumlah Alat Teknologi tepat guna yang dihasilkan berdasarkan potensi sumber daya alam	Data Jumlah Alat yang dihasilkan
Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	Desa	Laporan Hasil Perhitungan Tipologi Desa berdasarkan Profil Desa	Laporan Hasil Perhitungan Tipologi Desa Berdasarkan Profil Desa

2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.821.930.574,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.537.509.944,00	52.62
2	Belanja Langsung	2.284.420.630,00	47,37
Jumlah		4.821.930.574,00	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	299.626.000,-	23,34
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif		
Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	16.723.000,-	1,30
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	66.496.500,-	5,18
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	8.607.000,-	0,67
Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	523.493.000,-	40,79
Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	71.060.500,-	5.54
Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi	541.202.980,-	42.16
TOTAL		1.527.208.980	100,00

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 1.283.478.700,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri yaitu sebesar 42,16%. Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan yaitu sebesar 40,79%. Sasaran lain dengan anggaran relatif besar yaitu Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas yaitu sebesar 23,34%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan sebesar 0,67% dari total anggaran belanja langsung dan sisanya merupakan anggaran program rutin dan kesekretariatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 ≤ 90	Tinggi	T
3.	66 ≤ 75	Sedang	S
4.	51 ≤ 65	Rendah	R
5.	≤ 50	Sangat Rendah	SR

3.1. Capaian Indikator Kinerja 2018

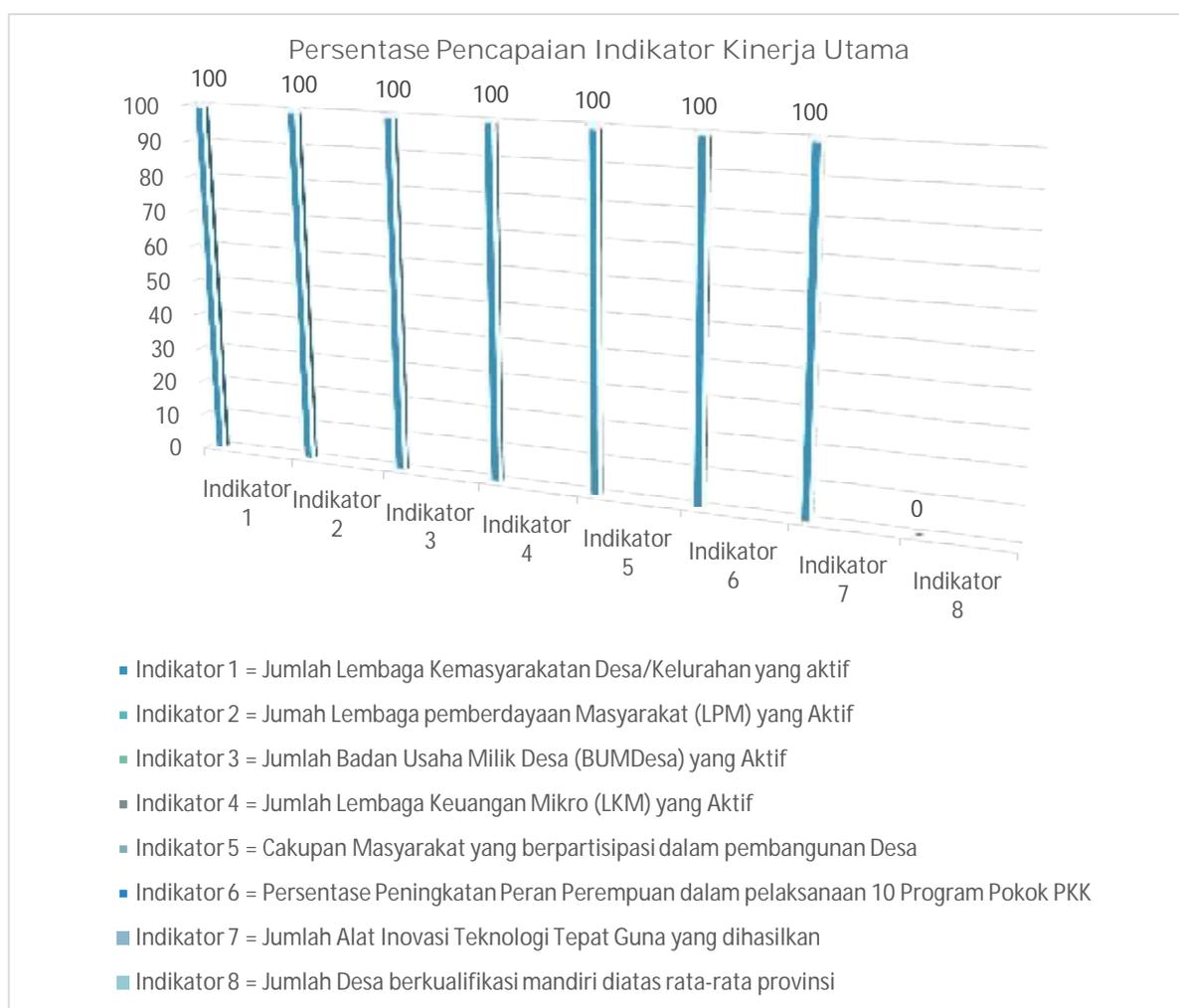
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM= 75; Pokja Posyandu Desa =75	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa =80	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa =80	100	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa= 80	100
2	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	50 LPM	80 LPM	80 LPM	100	80 LPM	100
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	65 BUM-Desa	67 BUM-Desa	67	100	67	100
4	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21 LKM	21 LKM	21	100	21	100
5	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	23 %	23 %	23	100	23	100
6	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100 %	100 %	100	100	100	100
7	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	14 Alat	2	2	100	14	100
8	Jumlah Desa berkualitas mandiri diatas rata-rata provinsi	0 Desa	15	0	0	15	0
Rata-Rata Capaian					97,55		84,30

Dari 8 (*Delapan*) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018, 7 (*Tujuh*) indikator menunjukkan capaian 100% kecuali indikator Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat 7 (*Tujuh*) atau keseluruhan indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, namun indikator Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi dengan capaian 0%.

Berikut Grafik Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018.



Grafik 3.1. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018

3.1.1. Pengukuran Kinerja Misi 1

“Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia”

Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa = 80	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa = 80	100
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	80 LPM	80 LPM	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Indikator kinerja Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80 dengan realisasi PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80 sehingga capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 100%.

Indikator kinerja Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 80 LPM dengan realisasi 80 LPM sehingga capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM= 50; Pokja Posyandu Desa= 30	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa= 75	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa= 80	100	102	100
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	50 LPM	80 LPM	80 LPM	100	106,66	100

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas**, yaitu :

Untuk Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif, pada tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target PKK sebanyak 80, LPM sebanyak 50, Pokja Posyandu Desa sebanyak 30.

Pada tahun 2017 capaiannya melebihi dari target PKK sebanyak 80, LPM sebanyak 75, Pokja Posyandu Desa sebanyak 30 dan tercapai sebanyak PKK sebanyak 80, LPM sebanyak 80, Pokja Posyandu Desa sebanyak 30 sehingga capaiannya sebesar 102% yang melebihi target yaitu Jumlah LPM dari target sebanyak 75 namun terealisasi sebanyak 80, sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan yaitu PKK sebanyak 80, LPM sebanyak 80, Pokja Posyandu Desa sebanyak 80.

Sedangkan untuk Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif, pada tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target LPM sebanyak 50.

Pada tahun 2017 capaiannya melebihi dari target LPM sebanyak 75 dan tercapai LPM sebanyak 80 atau 106,66%, sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan yaitu LPM sebanyak 80.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2018	Capaian (%)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	PKK = 80; LPM = 80; Pokja Posyandu Desa = 80	100

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM	80 LPM	80 LPM	100
---	-----	--------	--------	-----

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 100% dari target 100%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dengan baik;
2. Dengan adanya Dana Desa pembangunan semakin berkembang dan pengelolaan administrasi pemerintahan Desa semakin membaik dan menciptakan pembangunan yang terarah.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan PKK, telah mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai maupun pemerintah Desa yang cukup memadai sehingga kegiatan-kegiatan PKK dapat berjalan dengan baik.
4. Meningkatnya kesadaran para pengurus PKK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus PKK
5. Adanya regulasi mengenai PKK mulai dari tingkat Pusat sampai kabupaten.
6. Adanya kesadaran pemerintah Desa/Kelurahan bahwa peran posyandu dalam sistem pelayanan kesehatan dasar sangat penting terutama kegiatan imunisasi, gizi dan upaya kesehatan ibu dan anak.
7. Dengan adanya Dana Desa Pembangunan dan pemberdayaan posyandu sudah menjadi perhatian bagi pemerintah desa.
8. Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Lintas Sektor semakin terarah.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum sepenuhnya bekerja maksimal.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harusnya bersifat independen, mandiri dan kreatif.
3. Pemerintah Desa tidak memberikan kewenangan penuh dalam kegiatan pembangunan sebagaimana tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Sumber daya manusia aparat Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan pembinaan pokja posyandu masih kurang.

5. Perlunya perhatian pemerintah secara berkelanjutan terhadap keberadaan lembaga terkait pelayanan dasar posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.
6. Perlu peningkatan sumber daya manusia para pengurus Pokja Posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Melakukan Pembinaan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
2. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM;
3. Melakukan penguatan LPM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
4. Telah dilakukan pembinaan bagi kader-kader PKK berupa bimbingan teknis, Pelatihan, penyuluhan, pelatihan keterampilan, rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan
5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi ditingkat kabupaten terkait pembinaan pokjanal posyandu.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah sebesar Rp.299.626.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.299.226.100,- atau 99,86% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,14%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah Program Peningkatan keberdayaan masyarakat di pedesaan.

Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

1. **Kegiatan Pembinaan Pokjanal Posyandu** dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Pokjanal Posyandu 9 Kecamatan. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Keanggotaan pokjanal dan Pokja posyandu berasal dari berbagai instansi teknis maupun pendukung yang diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa posyandu merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka memberikan layanan sosial dasar. Keberadaan pokjanal posyandu merupakan wadah yang sangat diperlukan dalam rangka pembinaan posyandu di masing-masing level pemerintahan, posyandu itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam rangka pembinaan pokjanal posyandu dan pokja posyandu selain melakukan

pembinaan terhadap posyandu juga dilakukan evaluasi terhadap posyandu untuk mengetahui keaktifan posyandu yang ada.

2. **Kegiatan Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)** dalam hal ini Pembinaan dilakukan sebagai langkah yang strategis dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia pengurus lembaga Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Dan juga menciptakan persatuan dan kebersamaan dari tiap Desa dalam mengembangkan serta meningkatkan pembangunan dari tiap Desa. Selain itu sinkronisasi kegiatan dari tiap Desa dapat tercipta dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Misi 2

“Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat”

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	67	67	100
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	21	21	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari 3 (Tiga) Indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat**, masing-masing terealisasi Indikator Kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif pada capaian kerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni 100%.

Indikator kinerja Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni 100% yang jumlahnya konstan 21 LKM tetap terbina setiap tahun sebanyak 21 unit LKM.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	41	65	67	113,88	106,55	100
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21	21	21	100	100	100

Dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat,**

Untuk Indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif, pada tahun 2016 capaiannya melebihi dari target yaitu sebesar 113,88% dari target yang ditetapkan sebanyak 36 unit BUMDesa namun terealisasi sebanyak 41 BUMDesa, pada tahun 2017 capaiannya melebihi target dengan capaian sebesar 106,55% dari target yang ditetapkan sebanyak 61 Unit BUMDesa dan terealisasi sebanyak 65 unit BUMDesa sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan yaitu 67 BUMDesa.

Untuk Indikator Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif, pada tahun 2016 capaiannya mencapai target yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 21 unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2018	Capaian (%)
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	BUMDesa	67	67	100
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	LKM	21	21	100

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 100% dari target 100%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka

capaian kinerja telah mencapai 100% walaupun jumlah LKM adalah Konstan.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh :

1. Tingginya kepedulian instansi terkait dalam melakukan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya simpan pinjam khusus perempuan (SPP);
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dasar pengelola LKM melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten;
3. Selain itu sosialisasi dan informasi yang lengkap mengenai BUMDesa dan memiliki Payung Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Disosialisasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa di 8 (Delapan) Kecamatan, yang memungkinkan BUMDesa dibentuk dan dikembangkan.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi yang dapat membangkitkan Perekonomian Masyarakat terdapat masalah-masalah yang dihadapi diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan aktif melaksanakan aktivitas perekonomian, akan tetapi unit usaha yang dibentuk belum berdasarkan potensi unggulan Desa dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Masih banyak usaha BUMDesa yang bergerak dibidang simpan pinjam
3. Pemahaman pengurus Lembaga Keuangan Mikro yang baru belum memadai
4. Ada beberapa kelompok SPP yang tunggakannya bermasalah

Solusi :

Dari permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. BUMDesa yang terbentuk diarahkan untuk membentuk unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi lokal wilayah dan Pengurus BUMDesa ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan dan bimbingan.
2. Penguatan kapasitas Pengurus UPK yang baru melalui Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi perkembangannya yang melibatkan stakeholder terkait.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat** adalah sebesar Rp.83.219.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.82.997.500,- atau 99,73% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,27%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran **Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas** adalah Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan.

Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

1. **Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro**; dengan melakukan koordinasi dan pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan terhadap Lembaga keuangan Mikro (LKM) yang masih aktif dan berjalan sampai sekarang ini, maka dari itu diperlukan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi program pemerintah Desa seperti UED-SP dan UPK SPP PNPM-MP, sehingga dapat meningkatkan pemahaman / pengetahuan dasar, keterampilan dan sikap dalam pengelolaannya

2. **Pembinaan BUMDesa**; dengan melakukan koordinasi dan pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan terhadap 67 BUMDesa, sehingga dapat meningkatkan pemahaman / pengetahuan dasar, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan BUMDesa.
 Pembinaan BUMDesa diarahkan untuk membentuk unit usaha yang sesuai kebutuhan dan potensi lokal yang ada di desa. Pembinaan BUMDesa sebanyak 67 unit yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan

3.1.3. Pengukuran Kinerja Misi 3

“Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat”

Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
				Target	Realisasi	

1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	%	23	60,02	260,86
----	--	---	---	----	-------	--------

Indikator kinerja cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa pada sasaran **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni 23% sehingga capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 260,02%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	47	38	60,02	204,34	165,21	260,86

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan di Pedesaan dengan indikator Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Desa, pada tahun 2016 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 204,34%, pada tahun 2017 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 165,21% dan pada tahun 2018 capaian meningkat menjadi 260,86%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2018	Capaian (%)
Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	%	23	48,34	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor-faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Tingkat kesadaran masyarakat mulai membaik dalam hal melakukan gotong royong;

2. Pembinaan yang dilakukan oleh OPD teknis semakin terarah;
3. Administrasi pemerintahan desa semakin baik sehingga mampu menghitung partisipasi masyarakat.

Permasalahan :

Dalam mencapai sasaran Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti :

1. Sumberdaya Manusia aparatur Desa dalam hal kompetensi masih rendah;
2. Masih rendahnya pendekatan persuasif kepada masyarakat oleh Pembina Desa dan tokoh masyarakat;
3. Masih perlu peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, dapat terpecahkan dengan berbagai solusi yang dilakukan, seperti :

1. Perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi aparatur Desa dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat;
2. Pembinaan berkelanjutan oleh OPD terkait terutama Dinas PMD;
3. Perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi masyarakat dan aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis terutama dalam menghitung nilai swadaya dan partisipasi yang ada.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa adalah sebesar Rp.8.607.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.8.521.000,- atau 99,00% dengan capaian kinerja 260,86%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 161,86%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pembangunan di Pedesaan adalah Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat merupakan upaya-upaya untuk menggelorakan semangat gotong-royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berdasarkan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki dan bertanggungjawab dalam melaksanakan, memanfaatkan dan melestarikan semangat gotong royong yang telah mulai luntur.

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini dimulai dari penancangan pada Tanggal 13 Juli 2018 yang bertempat di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai kemudian dilanjutkan dengan pemantauan serta monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pelaporan untuk 67 Desa dan 13 Kelurahan serta 9 Kecamatan, pelaporan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa / Kelurahan serta Kecamatan.

3.1.4. Pengukuran Kinerja Misi 4

“Meningkatkan peran perempuan di pedesaan”

Sasaran 1 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	100	100	100

indikator kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK pada sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan**, pada tahun 2016 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 100%, pada tahun 2017 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018

Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** mencapai target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 100%.

Dengan Indikator Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, pada tahun 2016 capaiannya mencapai 100%, pada tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2018	Capaian (%)
Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	%	100	100	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 100% dari target.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, dipengaruhi oleh motivasi dan semangat kerja yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dan stakeholder lainnya serta dukungan dana yang ada.

Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu mendorong dan memotivasi Kader-kader PKK untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan workshop secara berkesinambungan. Melakukan pembinaan secara rutin setiap tahun, baik pembinaan administrasi maupun pembinaan keterampilan.

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** ditemui berbagai permasalahan-permasalahan, seperti :

1. Sebagian pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kader PKK mempunyai tugas pokok masing-masing sehingga sulit diharapkan partisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan Kegiatan PKK.
2. Anggota Dasa Wisma masih ada yang belum aktif di setiap kelompok Dasa Wisma

karena kesibukan mengurus rumah tangga dan aktifitas masing-masing.

3. Pelaporan hasil kegiatan Tim Penggerak PKK Desa/kelurahan, kecamatan belum tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** ditempuh solusi, sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan pemahaman kepada Pengurus PKK Kabupaten dan Kader PKK bahwa pentingnya mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tugas pokok dan tambahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
 2. Telah dilakukan pemantauan dan pembinaan di setiap Kecamatan agar anggota Dasa Wisma dapat aktif, terutama dalam melaksanakan Pendataan Dasa Wisma di setiap wilayah tempat tinggal masing-masing.
 3. Setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah diberikan surat tentang jadwal pelaporan agar tepat waktu.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** adalah sebesar Rp. 523.493.000,- dari anggaran yang dialokasikan tersebut terealisasi sebesar Rp. 512.473.000,- atau 97,89% dengan rata-rata capaian sebesar 100%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,11%.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program penunjang terhadap pencapaian sasaran **Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan** adalah Program Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan.

Kegiatan penunjang pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. **Kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK**

Peringatan HKG adalah merupakan salah satu kegiatan PKK yang dilaksanakan setiap tahun merupakan kegiatan rutin PKK Kabupaten Sinjai, Puncak Hari Kesatuan Gerak PKK biasanya dilaksanakan pada bulan November setiap tahunnya dan sebelum puncak Hari Kesatuan Gerak PKK dilaksanakan maka dilakukan kegiatan-kegiatan lomba menyanyi lagu Mars PKK dan lomba Berbusana yang baik.

Peringatan HKG bukan sekedar memeriahkan dan memperingatinya tetapi bagaimana memberikan motivasi dan semangat bagi kader-kader PKK agar tetap harus giat melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Pengurus PKK Kabupaten, Pengurus PKK Kecamatan, Pengurus PKK Desa/Kelurahan dengan mengikutkan Kader PKK, Para Kepala Perangkat Daerah, Organisasi Wanita dengan jumlah Peserta 1335 Orang.

2. **Pembinaan Kelompok Dasa Wisma**

Pembinaan Kelompok Dasa wisma merupakan realisasi program pokok PKK yang dilaksanakan pada tahun 2018. Dasa wisma merupakan kelompok perpuluhan yang terdiri dari dasa artinya perpuluhan, wisma adalah rumah.

Pembinaan dasa wisma ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan kelompok dasa wisma dengan melakukan penilaian kelompok dasawisma perwakilan Desa/Kelurahan yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Penilaian ini dilakukan oleh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten yang telah dibuatkan SK Bupati sebagai Tim Penilai dengan mengikutkan unsur dari sekretariat, Unsur POKJA I, POKJA II, Pokja III dan POKJA IV. Pembinaan kelompok dasa wisma penting karena penerapan 10 Program Pokok PKK ada pada kelompok Dasa Wisma dan Dasa Wisma merupakan sumber data yang paling akurat jika hal itu berjalan dengan baik.

Lokasi Pelaksanaan Penilaian dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan sasaran Kelompok Dasa Wisma.

3. Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai

Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai merupakan kegiatan rutin setiap tahun dengan mengundang Pengurus PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan PKK Desa/Kelurahan, tujuannya adalah untuk menyelaraskan kegiatan PKK Kabupaten dengan Kegiatan PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Rakor ini biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Rakor Pertama menyampaikan program kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Kabupaten, Rakor Kedua dilakukan oleh PKK Kabupaten dengan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh PKK Kecamatan, Desa / Kelurahan.

4. Kegiatan Bimbingan Teknis Kader BKB terintegrasi PAUD dan POSYANDU

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK yang merupakan salah satu realisasi 10 Program Pokok PKK khususnya Pembinaan Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Kader Pokja II Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan berjumlah 80 Orang

5. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit

Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit merupakan realisasi 10 Program Pokok PKK khususnya Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader PKK agar mereka mampu menjahit dengan dilatih membuat pola dasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan minimal dapat membuat baju sendiri.

Lokasi Pelaksanaan di Aula Pertemuan PKK Kabupaten Sinjai dengan jumlah Peserta sebanyak 40 Orang.

6. Kegiatan Penyuluhan PHBS

Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu program Tim Penggerak PKK Kabupaten khususnya Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para kader PKK agar mereka mampu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan dan di rumah tangga masing-masing. Kegiatan ini erat sekali hubungannya dengan peningkatan derajat kesehatan keluarga dilaksanakan di

kabupaten dengan mengundang peserta dari POKJA IV Tim Penggerak PKK Kecamatan / Desa dan Kelurahan sebanyak 80 Orang.

7. Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga

Pembinaan pola Asuh Anak dalam Keluarga merupakan salah satu Program Pokok PKK Kabupaten dan merupakan realisasi 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini dilakukan oleh POKJA I Tim Penggerak PKK Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK khususnya POKJA IV agar para kader mampu melakukan pembinaan pada lingkungannya terkait dengan tata cara pola pengasuhan agar mereka dan anak-anak mereka mampu mandiri, cerdas, terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan berakhak yang baik sesuai tuntutan agama. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Ketua POKJA/Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dengan Jumlah 80 Orang.

8. Kegiatan Lomba Kelompok Kadarkum

Lomba Kelompok Kadarkum merupakan salah satu dari 10 Program Pokok PKK Kabupaten khususnya POKJA I. Bertujuan untuk mengevaluasi dengan melakukan lomba pada kelompok Kadarkum yang telah terbentuk di Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan perwakilan dari Desa/Kelurahan dan yang dilombakan dengan jumlah kelompok 9 Kelompok dari 9 kecamatan.

9. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Kader Posyandu

Bimtek penyuluhan kader posyandu merupakan salah satu dari 10 Program Pokok PKK Kabupaten Sinjai khususnya POKJA IV dengan mengundang Kader Posyandu perwakilan masing-masing Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Kabupaten, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader posyandu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di posyandu masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kabupaten Sinjai dengan sasaran kader posyandu Desa/Kelurahan sebanyak 80 Orang.

10. Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk terwujudnya kelancaran administrasi kesekretariatan PKK yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing jenjang memang perlu pembinaan kontinyu. Metode yang dilaksanakan adalah penyiapan ATK untuk kebutuhan 12 Bulan, penyiapan belanja cetak dan penggandaan, fasilitasi sarana dan prasarana kelengkapan dan biaya perjalanan Dalam dan Luar Daerah yang pelaksanaannya mulai bulan Januari sampai Desember 2018.

11. Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan Hatinya PKK

Pembinaan ini merupakan salah satu dari 10 Program Pokok PKK khususnya POKJA III Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai. Lahan pekarangan merupakan potensi

besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga hanya saja pemanfaatannya perlu pembinaan secara maksimal tentunya tidak lain untuk mendekatkan pasar dan mengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat. kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi melalui penilaian pemanfaatan halaman pekarangan di Kecamatan dengan Penunjukan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk diikuti lomba yaitu perwakilan Desa/Kelurahan

3.1.5. Pengukuran Kinerja Misi 5

“Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna”

Sasaran 1 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	2	2	100

Indikator kinerja jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan pada sasaran **Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	10	2	2	100	100	100

Dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2016, tahun 2017 dan Tahun 2018, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** dengan indikator Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan, pada tahun 2016 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 100%, pada tahun 2017 capaiannya mencapai target dengan capaian sebesar 100% begitupula pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2018	Capaian (%)
Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Alat	14	14	100

Perbandingan antara realisasi indikator **jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan** terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 100% dari target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan Indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan sebanyak 2 alat tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018, dipengaruhi oleh :

- Peningkatan kemampuan pendidikan, keterampilan, inovasi serta aplikasi Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat
- Adanya Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk merumuskan strategi yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam.

Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu alat inovasi yang akan dihasilkan oleh masyarakat seyogyanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam dokumen pemetaan teknologi tepat guna yang berbasis sumber daya alam; Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung teknologi lebih ditingkatkan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna, sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Minat masyarakat terhadap Inovasi Teknologi Tepat Guna masih rendah
2. Masyarakat belum mengetahui alat TTG yang ramah lingkungan, murah dan berdasarkan kearifan lokal setempat serta mempunyai nilai ekonomis untuk pendapatan keluarga yang bernilai jual.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi ditempuh solusi-solusi yang dilakukan untuk mencapai target sasaran meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam dengan indikator jumlah alat inovasi teknologi tepat guna, sebagai berikut :

1. Menggiatkan gerakan inovasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada berdasarkan kebutuhan masyarakat.
 2. Dokumen Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) disosialisasikan dan diketahui masing-masing wilayah sebagai acuan untuk inovasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masing-masing wilayahnya.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran **meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam** adalah sebesar Rp.71.060.500,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 71.044.500,- atau 99,97%, dengan rata-rata capaian sebesar 100%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,03%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung terhadap pencapaian sasaran didukung oleh Program Pengembangan dan pengembangan Sumber Daya Alam dan TTG,

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan dan pembinaan posyantek sebagai wadah teknologi tepat guna di kecamatan dan Desa/kelurahan sejak tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 9 (Sembilan) Posyantek yang berkedudukan di kecamatan dan 56 Wartek yang berkedudukan di Desa/Kelurahan; kegiatan ini dimaksudkan untuk pembentukan dan pembinaan Posyantek dan Wartek sebagai pusat bimbingan bagi pemanfaat/pengguna TTG dan sebagai pusat pelayanan informasi TTG serta membuka peluang usaha.

Kegiatan dilaksanakan dengan rapat pembinaan pada Kecamatan, pembentukan Posyantek/Wartek dan keikutsertaan dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional dalam upaya mempublikasikan dan mempromosikan alat hasil inovasi masyarakat.

3.1.6. Pengukuran Kinerja Misi 6

“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas”

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Capaian Kinerja
----	-------------------	--------	------------	-----------------

			Target	Realisasi	Tahun 2018 (%)
1.	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	Desa	0	0	0

Indikator Kinerja Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi pada sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri** capaian kerjanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	0	0	0	0	0	0

Indikator kinerja Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi pada sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional**, tidak tercapai.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2018	Capaian (%)
Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	Desa	15	0	0

Dari target yang telah ditetapkan dalam renstra indikator kinerja Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya desa yang memenuhi syarat Desa Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan menetapkan Desa Persiapan Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 530 Tahun 2017 tentang Pencanangan Desa Persiapan Mandiri Kabupaten Sinjai serta Pembentukan Tim Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat

untuk penguatan Tata Kelola Fungsi Pemerintahan Desa melalui Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 484 Tahun 2017.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tidak tercapainya/terrealisasinya target adalah sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi adalah :

1. Pengelolaan Data Kualifikasi Desa dan penetapan status Desa merupakan kewenangan pemerintah Pusat berdasarkan Instrument yang ada pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
2. Sumberdaya dan kompetensi aparatur Desa relatif masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penentuan klasifikasi Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia Aparatur masih rendah
2. Pemeliharaan hasil pembangunan secara swadaya masih belum memadai
3. Terdapat 2 (dua) versi regulasi yang mengatur klasifikasi desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Solusi-solusi yang dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata provinsi, sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan langsung pada Desa.
2. Pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh Desa agar instrumen desa mandiri bisa tercapai.
3. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan swadaya dan kegotongroyongan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2017 untuk pencapaian sasaran sasaran **Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri** dengan indikator Jumlah desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi adalah sebesar Rp. 541.202.980,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 540.444.735,- atau 99,85%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

penyataan kinerja.

Program yang menunjang terhadap pencapaian sasaran ini adalah :

1. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa,
Dengan kegiatan yang menunjang sebagai berikut :

a. Kegiatan evaluasi dan pelaporan administrasi aset Desa;

Aset adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Evaluasi dan pelaporan administrasi aset desa dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pengadministrasian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Desa serta proses penatausahaan yang terkait dalam pengelolaan aset Desa tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.

Sasaran evaluasi dan pelaporan administrasi desa adalah 67 Pemerintah Desa dengan mengundang aparat Desa pengelola Aset Desa.

b. Kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;

Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan.

Maksud perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.

Lomba Desa dan Kelurahan ini bertujuan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemukenali, mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi yang ada di wilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa / Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kewilayahan serta pembinaan kemasyarakatan. Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan.

Bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, diperlukan instrument pengungkap data sebagai alat ukur perkembangan Desa/Kelurahan. Sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan yang di dalamnya ada 3 bentuk evaluasi :

- a. Evaluasi bidang pemerintahan
- b. Evaluasi bidang kewilayahan

- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan dan dalam penilaian evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.

Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dilakukan di 7 Kecamatan yang mewakili masing-masing kecamatan yaitu Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat, Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan, Desa Samaturue Kecamatan SinjaiTellulimpo, Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur, Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah, dan Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan. Dan yang mewakili kabupaten Sinjai dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo dan berhasil menjadi Juara II Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Kegiatan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala Desa, perangkat Desa maupun pihak-pihak yang memiliki wewenang di desa yang berdasarkan transparansi dan akuntabel, yang mana merupakan satu-satunya pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Adapun LPPD biasanya di laporkan atau dibuat pada akhir tahun anggaran sampai tiga bulan berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret Tahun berkenaan).

Evaluasi LPPD 67 Pemerintah Desa dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang pemerintah Desa.

d. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan Desa;

Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber daya dan informasi oleh penyelenggara pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemberian petunjuk langsung kepada pengelola administrasi desa sesuai dengan petunjuk yang ada dan atau regulasi yang berlaku. Dimana bertujuan untuk mengetahui perkembangan administrasi desa dan memberikan pemahaman kepada pengelola administrasi Desa sebanyak 67 Desa dengan mengundang pengelola administrasi Desa yang pelaksanaannya di Kecamatan masing-masing.

e. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

f. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa;

Dengan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola keuangan Desa bagi 67 Desa.

g. Kegiatan Bimbingan Teknis Penatakelolaan Aset Desa;

Bimbingan Teknis pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai ruang lingkup dalam regulasi pengelolaan aset desa dan diharapkan mampu menjabarkan maksud dan tujuan yang tertuang dalam regulasi pengelolaan aset desa. Memberikan pemahaman mengenai inventarisasi dan penatakelolaan Desa bagi Aparat Desa. Aparatur Desa yang menangani aset Desa sebanyak 67 Desa yang dilaksanakan di kabupaten.

h. Kegiatan Asistensi Rancangan Peraturan Desa;

Jenis-jenis peraturan Desa, jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara Pemerintahan di Desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif. Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk implementasi dari kewenangan itu.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasistensi rancangan peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa yang dilakukan di Kabupaten.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 98,54% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran inovasi Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam (99,97%). Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan (97,89%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu,

maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa=80	PKK=80; LPM= 80; Pokja Posyandu Desa=80	100	299.626.000	299.226.100	99,86
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	80 LPM	80 LPM	100			
2	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	67 BUM-Desa	67	100	83.219.500	82.977.500	99,73
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21 LKM	21	100			
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	23 %	60,02	260,86	8.607.000	8.521.000	99,00

4	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100 %	100	100	523.493.000	512.473.000	97,89
5	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	2	2	100	71.060.500	71.044.500	99,97
6	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	12	0	0	541.202.980	540.444.735	99,85

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 8 (Delapan) sasaran, menunjukkan pencapaian kinerja yang sama atau 100% kecuali sasaran terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang Aktif	100	99,86	0,14
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	100		
2	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	100	99,73	0,27
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	100		
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	100	99,00	161,86
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK	100	97,89	2,11

5	Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	100	99,97	0,03
6	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualitas mandiri di atas rata-rata Provinsi	0	99,85	0

Sebagai contoh, untuk sasaran Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Lokalitas, telah mencapai kinerja sebanyak 100% dari target yang telah ditetapkan namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,86% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat, telah mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan dan hanya terealisasi sebesar 99,73%, untuk sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 260,86%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99%.

Capaian sasaran Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97,89%.

Sasaran Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,97%.

Namun sasaran Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri dengan indikator kinerja jumlah Desa berkualitas mandiri di atas rata-rata provinsi tidak terealisasi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2018 adalah tinggi, karena terdapat 7 (Tujuh) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi, namun terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel partisipatif dan mandiri.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam

siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2018

I. PENGHARGAAN DARI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018

- Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa, dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan memperoleh Penghargaan pada Perlombaan *Desa dan Kelurahan* Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari *Gubernur Sulawesi Selatan* melalui *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan* Desa *Lamatti Riaja* Kecamatan *Bulupoddo* sebagai *Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan*.



PIAGAM PENGHARGAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP**

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SABIRIN YAHYA, S.Sos**

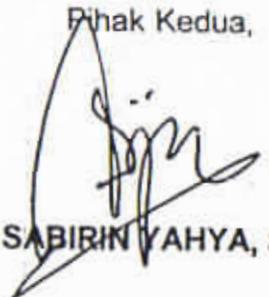
Jabatan : Bupati Sinjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

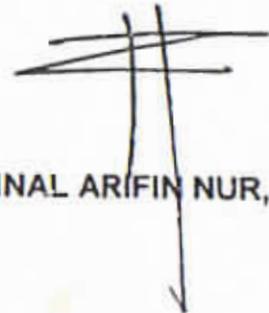
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. SABIRIN YAHYA, S.Sos

Sinjai, 29 Januari 2018

Pihak Pertama,


A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Keberdayaan dan Keswadayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Lokalitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	PKK = 80 LPM = 80 LPM Pokja Posyandu Desa = 80 Pokja
		Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	LPM = 80 LPM
2.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berbagai aspek yang Dapat Menunjang Kelangsungan Pembangunan	Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	100%
3.	Meningkatnya jumlah Lembaga yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang Aktif	21 LKM
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	67 BUMDesa
4.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di pedesaan	Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	23 %
5.	Meningkatnya inovasi Teknologi Tepat Guna Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan	2 alat
6.	Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata provinsi	15 desa

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.378,133,450.00	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.343,846,000.00	
3. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.28,126,300.00	
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.304,740,500.00	
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.92,319,500.00	
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Rp.25,412,000.00	
7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp.523,493,000.00	
8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TGT	Rp.71,060,500.00	
9. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	Rp.326,556,600.00	
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.253,492,780.00	

Sinjai, 29 Januari 2018

Pihak Kedua,

H. SABIRIN YAHYA, S.Sos

Pihak Pertama,

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Kode Pos 92616

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20)
26. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 44);
28. Keputusan Bupati Nomor 876 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan Informasi;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

- Sinjai;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada pimpinan instansinya.

- KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan upah kerja 1 (satu) kali kegiatan dengan besar upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 1.02.12.1.02.12.01.02.001
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Januari 2019

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SINJAI,**



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (*sebagai laporan*);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kepala Bagian Administasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sinjai;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sinjai;
9. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Upah Kerja (Rp.)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Ketua	-	1 Kali Kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	-	1 Kali Kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
4.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
5.	Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
6.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
8.	Nusriadi, SM	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
9.	A. Ida Royani	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
10.	A. Miliyati	Anggota	-	1 Kali Kegiatan
11.	Muhammad Yusuf, S. Ip	Sekretariat	220.000,00	1 Kali Kegiatan
12.	Sukmayanti, S.Si	Sekretariat	220.000,00	1 Kali Kegiatan
13.	Nurfaizah, S. Sos	Sekretariat	220.000,00	1 Kali Kegiatan


**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SINJAI,**

A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Nomor SOP	1.22.02.01.02.07
Tgl Pembuatan	13 Maret 2016
Tgl Revisi	30 April 2018
Tgl Efektif	11 Juli 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI  ANDI ZAINAL ABIDIN NUR, SIP NIP. 196111031984021001 Pengumpulan Data Kinerja
Nama SOP	

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67)

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pembuatan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan
3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Kertas Kop
3. Kertas
4. Printer

Peringatan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menugaskan Sekretaris untuk menyusun laporan data kinerja SKPD setiap triwulan					1. Disposisi pimpinan 2. Perjanjian kinerja, Rencana aksi	15 Menit	1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	
2. Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan bahan laporan kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	15 Menit	1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	
3. Mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian kinerja dan rencana aksi	60 Menit	Catatan Pembagian tugas dan format data	
4. Menyerahkan format data kinerja kepada Penanggungjawab data					Catatan Pembagian tugas dan format data	120 Menit	Data kinerja	Pengumpulan data sampai 3 hari kerja
5. Melakukan verifikasi data					Data kinerja	5 Jam	Hasil verifikasi data	

JUMLAH PKK AKTIF KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PKK	KEAKTIFAN		KET
				AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	Sinjai Barat	1	Tassililu	PKK Kel.Tassililu	✓	-
		2	Balakia	PKK Kel.Balakia	✓	-
		3	Arabika	PKK Kel. Arabika	✓	-
		4	Barania	PKK Kel Barania	✓	-
		5	G.Perak	PKK Kel G.Perak	✓	-
		6	B.Lempangan	PKK Kel B.Lempangan	✓	-
		7	B.Salama	PKK Kel B.Salama	✓	-
		8	Terasa	PKK Kel Terasa	✓	-
		9	T.Baji	PKK Kel T.Baji	✓	-
2	Sinjai Selatan	10	Sangiasseri	PKK Kel. Sangiasseri	✓	-
		11	Palangka	PKK Kel Palangka	✓	-
		12	Puncak	PKK Kel Puncak	✓	-
		13	Polewali	PKK Kel Polewali	✓	-
		14	Songing	PKK Kel Soding	✓	-
		15	Gareccing	PKK Kel Gareccing	✓	-
		16	Alenangka	PKK Kel Alenangka	✓	-
		17	Talle	PKK Kel Talle	✓	-
		18	Palae	PKK Kel.Palae	✓	-
3	Sinjai Timur	19	Aska	PKK Kel. Aska	✓	-
		20	B.Kamase	PKK Kel. B.Kamase	✓	-
		21	Samataring	PKK Kel.Samataring	✓	-
		22	Tongke-Tongke	PKK Kel.Tongke-Tongke	✓	-
		23	Panaikang	PKK Kel.Panaikang	✓	-
		24	Pasimarannu	PKK Kel.Pasimarannu	✓	-
		25	Sanjai	PKK Kel.Sanjai	✓	-
		26	Patalassang	PKK Kel.Patalassang	✓	-
		27	Lasiai	PKK Kel.Lasiai	✓	-

		28	Biroro	PKK Kel.Biroro	✓	-	
		29	B. Lengcese	PKK Kel.B. Lengcese	✓	-	
		30	Kampala	PKK Kel.Kampala	✓	-	
		31	Salohe	PKK Kel.Salohe	✓	-	
		32	Kaloling	PKK Kel.Kaloling	✓	-	
		33	Saukang	PKK Kel.Saukang	✓	-	
4	Sinjai Tengah	34	Samaenre	PKK Kel.Samaenre	✓	-	
		35	Kanrung	PKK Kel.Kanrung	✓	-	
		36	Baru	PKK Kel.Baru	✓	-	
		37	Saotanre	PKK Kel.Saotanre	✓	-	
		38	Sotengah	PKK Kel.Sotengah	✓	-	
		39	Bonto	PKK Kel.Bonto	✓	-	
		40	Saohiring	PKK Kel.Saohiring	✓	-	
		41	Pattongko	PKK Kel.Pattongko	✓	-	
		42	Kompang	PKK Kel.Kompang	✓	-	
		43	Gantarang	PKK Kel.Gantarang	✓	-	
		44	M.Tellue	PKK Kel.M.Tellue	✓	-	
5	Sinjai Utara	45	B.Nipa	PKK Kel.B.Nipa	✓	-	
		46	Lappa	PKK Kel.Lappa	✓	-	
		47	Bongki	PKK Kel.Bongki	✓	-	
		48	L. Rilau	PKK Kel.L. Rilau	✓	-	
		49	Alehanuae	PKK Kel.Alehanuae	✓	-	
		50	Biringere	PKK Kel.Biringere	✓	-	
6	S.Borong	51	Pasir Putih	PKK Kel.Pasir Putih	✓	-	
		52	Batu Belerang	PKK Kel.Batu Belerang	✓	-	
		53	Biji Nangka	PKK Kel.Biji Nangka	✓	-	
		54	Barambang	PKK Kel.Barambang	✓	-	
		55	B.Sinala	PKK Kel.B.Sinala	✓	-	
		56	Kassi Buleng	PKK Kel.Kassi Buleng	✓	-	
		57	Bonto Katute	PKK Kel.Bonto Katute	✓	-	
		58	Bonto Tengnga	PKK Kel.Bonto Tengnga	✓	-	

7	Bulupoddo	59	L.Riattang	PKK Kel.PKK Kel.L.Riattang	✓	-	
		60	L.Riaja	PKK Kel.L.Riaja	✓	-	
		61	B.Tellue	PKK Kel.B.Tellue	✓	-	
		62	Duampanuae	PKK Kel.Duampanuae	✓	-	
		63	T.Bulu	PKK Kel.T.Bulu	✓	-	
		64	L.Riawang	PKK Kel.L.Riawang	✓	-	
		65	L.Cinrana	PKK Kel.L.Cinrana	✓	-	
8	Tellulimpoe	66	Saotengah	PKK Kel.Saotengah	✓	-	
		67	Kalobba	PKK Kel.Kalobba	✓	-	
		68	T.Limpoe	PKK Kel.T.Limpoe	✓	-	
		69	Massaile	PKK Kel.Massaile	✓	-	
		70	L.Lohe	PKK Kel.L.Lohe	✓	-	
		71	Pattongko	PKK Kel.Pattongko	✓	-	
		72	Bua	PKK Kel.Bua	✓	-	
		73	Suka Maju	PKK Kel.Suka Maju	✓	-	
		74	Era Baru	PKK Kel.Era Baru	✓	-	
		75	Samaturue	PKK Kel.Samaturue	✓	-	
		76	Kel Mananti	PKK Kel.Kel Mananti	✓	-	
9	Pulau IX	77	B.Pitue	PKK Kel.B.Pitue	✓	-	
		78	Padaelo	PKK Kel.Padaelo	✓	-	
		79	P.Persatuan	PKK Kel.P.Persatuan	✓	-	
		80	P.Harapan	PKK Kel.P.Harapan	✓	-	
Jumlah					80	80 Desa/Kelurahan	

Sinjai, 31 Desember 2018
KEPALA DINAS PMD KAB.SINJAI



ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19611103 198408 1 001

JUMLAH LPM AKTIF SE-KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KEAKTIFAN		KET
			AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	SINJAI UTARA	1. BALANGNIPA	AKTIF		
		2. BONGKI	AKTIF		
		3. LAPP	AKTIF		
		4. ALEWANUAE	AKTIF		
		5. LAMATTI RILAU	AKTIF		
		6. BIRINGERE	AKTIF		
2	S.BARAT	1. ARABIKA	AKTIF		
		2. BARANIA	AKTIF		
		3. GUNUNG PERAK	AKTIF		
		4. TERASA	AKTIF		
		5. TENGGA LEMBANG	AKTIF		
		6. TURUNGAN BAJI	AKTIF		
		7. TASSILILU	AKTIF		
		8. BALAKIA	AKTIF		
		9. BONTOLEMPANGAN	AKTIF		
3	S.SELATAN	1. SANGIASSERI	AKTIF		
		2. PALANGKA	AKTIF		
		3. POLEWALI	AKTIF		
		4. SONGING	AKTIF		
		5. PALAE	AKTIF		
		6. ASKA	AKTIF		
		7. BULUKAMASE	AKTIF		
		8 TALLE	AKTIF		
		9. GARECCING	AKTIF		
		10. ALENANGKA	AKTIF		
		11. PUNCAK	AKTIF		
3	S.TIMUR	1. SAMATARING	AKTIF		
		2. TONGKE-TONGKE	AKTIF		
		3. PASIMARANNU	AKTIF		
		4. LASIAI	AKTIF		
		5. PANAIKANG	AKTIF		
		6. PATALASSANG	AKTIF		
		7. KAMPALA	AKTIF		
		8. SALOHE	AKTIF		
		9.KALOLING	AKTIF		
		10.BONGKI LENGKESE	AKTIF		
		11.SAUKANG	AKTIF		
		12.BIRORO	AKTIF		
		13. Sanjai	AKTIF		
4	SINJAI TENGAH	1. SAMAENRE	AKTIF		
		2. BONTO	AKTIF		
		3. KANRUNG	AKTIF		
		4. SAOTENGGA	AKTIF		
		5. BARU	AKTIF		
		6. SAOTANRE	AKTIF		
		7. SAOHIRING	AKTIF		
		8. PATTONGKO	AKTIF		
		9. GANTARANG	AKTIF		
		10.KOMPANG	AKTIF		
		11 MATTUNRENG TELLUE	AKTIF		
6	BULUPODDO	1. LAMATTI RIATTANG	AKTIF		
		2. LAMATTI RIAWANG	AKTIF		
		3. LAMATTI RIAJA	AKTIF		
		4. DUAMPANUAE	AKTIF		

		7. LAPPAL CINRANA	AKTIF		
7	SINJAI BORONG	1. PASIR PUTIH	AKTIF		
		2. KASSI BULENG	AKTIF		
		3. BATU BULERANG	AKTIF		
		4. BONTO KATUTE	AKTIF		
		5. BONTO SINALA	AKTIF		
		6. BIJI NANGKA	AKTIF		
		7. BARAMBANG	AKTIF		
		8. BONTO TENGGA	AKTIF		
8	TELLU LIMPOE	1.MANNANTI	AKTIF		
		2.TELLULIMPOE	AKTIF		
		3.KALOBBA	AKTIF		
		4.PATTONGKO	AKTIF		
		5.ERA BARU	AKTIF		
		6.LEMBANG LOHE	AKTIF		
		7.BUA	AKTIF		
		8.MASSAILE	AKTIF		
		9. SAMATURUE	AKTIF		
		10.SAOTENGAH	AKTIF		
		11.SUKA MAJU	AKTIF		
9	PULAU IX	1.PULAU PERSATUAN	AKTIF		
		2.PULAU HARAPAN	AKTIF		
		3.PULAU BUHUNG PITUE	AKTIF		
		4. PADAELO	AKTIF		
JUMLAH			80		

Sinjai 31 Desember 2018
 KEPALA DINAS PMD KAB.SINJAI



A.ZAINAL ARIFIN NUR,S.IP
 19611103 198408 1 001

JUMLAH POKJA POSYANDU AKTIF SE-KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KEAKTIFAN		KET
			AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	SINJAI UTARA	1. BALANGNIPA	AKTIF		
		2. BONGKI	AKTIF		
		3. LAPPA	AKTIF		
		4. ALEWANUAE	AKTIF		
		5. LAMATTI RILAU	AKTIF		
		6. BIRINGERE	AKTIF		
2	S.BARAT	1. ARABIKA	AKTIF		
		2. BARANIA	AKTIF		
		3. GUNUNG PERAK	AKTIF		
		4. TERASA	AKTIF		
		5. TENGGA LEMBANG	AKTIF		
		6. TURUNGAN BAJI	AKTIF		
		7. TASSILILU	AKTIF		
		8. BALAKIA	AKTIF		
		9. BONTOLEMPANGAN	AKTIF		
3	S.SELATAN	1. SANGIASSERI	AKTIF		
		2. PALANGKA	AKTIF		
		3. POLEWALI	AKTIF		
		4. SONGING	AKTIF		
		5. PALAE	AKTIF		
		6. ASKA	AKTIF		
		7. BULUKAMASE	AKTIF		
		8 TALLE	AKTIF		
		9. GARECCING	AKTIF		
		10. ALENANGKA	AKTIF		
		11. PUNCAK	AKTIF		
3	S.TIMUR	1. SAMATARING	AKTIF		
		2. TONGKE-TONGKE	AKTIF		
		3. PASIMARANNU	AKTIF		
		4. LASIAI	AKTIF		
		5. PANAIKANG	AKTIF		
		6. PATALASSANG	AKTIF		
		7. KAMPALA	AKTIF		
		8. SALOHE	AKTIF		
		9.KALOLING	AKTIF		
		10.BONGKI LENGKESE	AKTIF		
		11.SAUKANG	AKTIF		
		12.BIRORO	AKTIF		
		13. Sanjai	AKTIF		
4	SINJAI TENGAH	1. SAMAENRE	AKTIF		
		2. BONTO	AKTIF		
		3. KANRUNG	AKTIF		
		4. SAOTENGGA	AKTIF		
		5. BARU	AKTIF		
		6. SAOTANRE	AKTIF		
		7. SAOHIRING	AKTIF		
		8. PATTONGKO	AKTIF		
		9. GANTARANG	AKTIF		
		10.KOMPANG	AKTIF		
		11 MATTUNRENG TELLUE	AKTIF		
6	BULUPODDO	1. LAMATTI RIATTANG	AKTIF		
		2. LAMATTI RIAWANG	AKTIF		
		3. LAMATTI RIAJA	AKTIF		
		4. DIJAMPANIJAF	AKTIF		

		7. LAPP A CINRANA	AKTIF		
7	SINJAI BORONG	1. PASIR PUTIH	AKTIF		
		2. KASSI BULENG	AKTIF		
		3. BATU BULERANG	AKTIF		
		4. BONTO KATUTE	AKTIF		
		5. BONTO SINALA	AKTIF		
		6. BIJI NANGKA	AKTIF		
		7. BARAMBANG	AKTIF		
		8. BONTO TENNGA	AKTIF		
8	TELLU LIMPOE	1.MANNANTI	AKTIF		
		2.TELLULIMPOE	AKTIF		
		3.KALOBBA	AKTIF		
		4.PATTONGKO	AKTIF		
		5.ERA BARU	AKTIF		
		6.LEMBANG LOHE	AKTIF		
		7.BUA	AKTIF		
		8.MASSAILE	AKTIF		
		9. SAMATURUE	AKTIF		
		10.SAOTENGAH	AKTIF		
		11.SUKA MAJU	AKTIF		
9	PULAU IX	1.PULAU PERSATUAN	AKTIF		
		2.PULAU HARAPAN	AKTIF		
		3.PULAU BUHUNG PITUE	AKTIF		
		4. PADAELO	AKTIF		
JUMLAH			80		

Sinjai 31 Desember 2018
 KEPALA DINAS PMD KAB.SINJAI



A.ZAINAL ARIFIN NUR,S.IP
 19611103 198408 1 001

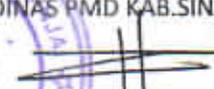


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

Jl. Madin Nomor 5 Kode pos 92612 Sulawesi Selatan Tlp (0482) 21086

PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK
PKK TAHUN 2018

NO	PELAKSANAAN 10 PROGRAM	PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK (%)
1	Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga	100
2	Lomba Kelompok Kadarkum	100
3	Pelatihan Jahit menjahit	100
4	Bimtek Kader BKB terintegrasi Paud dan Posyandu	100
5	Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan dan hatinya PKK	100
6	Pembinaan Kelompok Dasawisma	100
7	Penyuluhan PHBS	100
8	Bimtek Penyuluhan Kader Posyandu	100
9	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK	100
JUMLAH		100

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PMD KAB.SINJAI

A.ZAINAL ARIFIN NUR,S.IP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip.19611103 198408 1 001

**DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	KETERANGAN
2	2	3	4	5	6
1	BULUPODDO	- Tompobulu	Kareso Mandiri	- Penggemukan Sapi - Simpan Pinjam	
2		- Bulu Tellue	Mabbulo Sipeppa	- Unit Simpan Pinjam - Unit Ternak Sapi - Unit Budidaya Ikan Lele	
3		- Duampanuae	Duampanuae	- Jasa - Peternakan	
4		- Lappa Cinrana	Cinrana Bersatu	Simpan pinjam	
5		- Lamatti Riattang	Lamatti Riattang	- Waserda - Simpan Pinjam	
6		- Lamatti Riaja	Andi Makkuraga	Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih	
7		- Lamatti Riawang			
8	SINJAI BARAT	- Gunung Perak	Gunung Perak	Rias Penagntin	
9		- Turungan Baji	Turungan	- Usaha Perikanan - Penggemukan Sapi	
10		- Arabika	Arabika Wawokaraeng	Sementara merevisi pengurus/Pengelola BUMDesa	
11		- Botolempangan	Mekar	Perdagangan Pupuk Gas Elpiji 3 kg Penyewaan moleng Home industri Fotocopy ATK Jasa Pelayanan Brilink	
12		- Bonto salama	Cahaya Bonsal	- Penyediaan Madu - Percetakan - Kantin Kaju Araia	
13		- Barania	Riminassayya	- Jasa Sewa Moleng - Penggemukan Sapi	
14		- Terasa	Takkini	Simpan Pinjam	
15	SINJAI TIMUR	- Pasimarannu	Karya Mandiri	Penyewaan Kursi, Alat Musik dan Sound System	
16		- Kampala		Simpan Pinjam	
17		- Lasiai	Pada'idi	- Sewa Molen - Simpan Pinjam	
18		- Bongki Lengese	Bilopa Sejahtera	Simpan pinjam, Jasa Sewa Molen	
19		- Sanjai	Bijaksana	Simpan Pinjam	
20		- Patalassang	Patalassang	- Simpan Pinjam - Peternakan	
21		- Tongke-Tongke	Sipatokkong	Simpan Pinjam, penyewaan Kursi	
22		- Salohe	Mallu Sipakainge	Simpan Pinjam, Perdagangan	
23		- Biroro	Arung Bunne	Jasa Sewa Moleng	
24		- Panaikang	Barugae	Warkop	
25		- Kaloling	Pala-Pala	Simpan Pinjam	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	KETERANGAN
26		- Saukang	Saukang	Simpan Pinjam	
27	PULAU SEMBILAN	- Pulau Persatuan	Mattirowalle	Simpan Pinjam, Pengelolaan Genset Listrik Desa	
28		- Pulau Buhung Pitue	Sipatokkong	Simpan Pinjam, Penyewaan Pakaian Pengantin dan Baruga	
29		- Pulau Harapan	Harapan Baru	Simpan Pinjam, Perdagangan	
30		- Pulau Padaelo	Pulau Padaelo Sejahtera	Perdagangan Hasil Laut	
31	TELLULIMPOE	- Kalobba	Sejahtera Kalobba	Simpan Pinjam	
32		- Saotengah	Saotengah	Sewa Moleng/Pengadaan Jasa	
33		- Massaile	Harapan Jaya	Simpan Pinjam	
34		- Sukamaju	Beringin Java	Simpan Pinjam, Sewa Molen	
35		- Era Baru	Buatanae	Sewa Molen	
36		- Lembang Lohe	Amanah	Simpan Pinjam, Pengelolaan Pasar Desa	
37		- Tellulimpoe	Mandiri	Simpan Pinjam	
38		- Samaturue	Samaturue	Simpan Pinjam	
39		- Bua	Mega Buana	Simpan Pinjam	
40		- Pattongko		Sementara merevisi Pengurus/Pengelola BUMDesa	
41	SINJAI SELATAN	- Aska	Maju Bersama	Rias Pengantin, Sewa Alat Molen	
42		- Songing	Padaidi Sipakatuo	Penggemukan Sapi	
43		- Puncak	Samaturue	Simpan Pinjam, Pulsa listrik.	
44		- Gareccing	Sipakainge	Usaha Air Galon, Simpan Pinjam	
45		- Palaneka	Tonti Daeng Manggangka	Sewa Molen, Air Bersih dan Simpan Pinjam	
46		- Taile	Mabbulo Sipeopa	Warung kopi Pembibitan, Perkebunan dan Kehutanan	
47		- Polewali	Polewali Maju	Pengelolaan Pasar Desa, Perdagangan umum, Kerajinan Rakyat dan Industri RT, Pengelolaan Air Bersih	
48		- Bulu Kamase	Siamasei	Pertukangan, Peternak Sapi	
49		- Alenangka	Sipakatau	Simpan Pinjam, Sewa Alat Pengantin	
50		- Palae	Padaidi	Perdagangan	
51	SINJAI BORONG	- Barambang	Barambang Katute	Saprodi Pertanian	
52		- Biji Nangka	Tunas Harapan	Simpan Pinjam, Peternakan	
53		- Batu Belerang	Karya Indah	Simpan Pinjam	
54		- Bonto Sinala	Sipatuo	Peternakan	
55		- Bonto Katute	Batu Palla	Simpan Pinjam, Pengelola Air Bersih	
56		- Kassibulena	Karya Bakti Mandiri	Simpan Pinjam	
57		- Bontotengnga	Karya Mandiri	Peternakan, Rias pengantin, Kerajinan, Simpan Pinjam	
58	SINJAI TENGAH	- Saotengnga	Makalebata	Simpan Pinjam, Tenda Pengantin, Pengelolaan Air Bersih, Jual-Jual Alat Pertanian	
59		- Mattunreng Tellue	Mattunreng Tellue	Simpan Pinjam	
60		- Baru	Bina Usaha	Saprodi	
61		- Saohiring	Mattirodeceng	Pengelolaan Air Bersih, Pasar Desa, Simpan Pinjam	

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	KETERANGAN
62		- Kompang	Pattontongang	Sewa Elekton	
63		- Saotanre	Masvoa Haru	Pelayanan Jasa	
64		- Kanrunge	Sumber Surya	Simpan Pinjam, Pertanian dan Peternakan	
65		- Gantarang	Abbulo Sipappa	Pertanian dan Peternakan, Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Wisata	
66		- Bonto	Maju Bersama	Simpan Pinjam	
67		- Pattongko	Pattongko	Pengembangan Ternak ATK Penjualan Racun Pupuk Pangkas Rambut	
JUMLAH					



Mengetahui,
Ginas PMD Kab, Sinjai

A. ZAHAL ARIFIN NUR, SIP
 Tingkat: Pembina Utama Muda
 Nip. 19611103 198408 1 001

**DATA KELOMPOK USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
BINAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

No	Kecamatan/Desa/Kel	Nama Kelompok	Nama Ketua	L/P	Jumlah Anggota	Ket.
1.	Kecamatan Sinjai Tengah 1. Bonto	UED-SP Riski Amalia	- Nurhayati (Ketua) - Jannawirita (Sekertaris) - Intan (Bendahara)	P P P	35 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Kanrung	UED-SP Tasiwata	- Buhari Hamid (Ketua) - Firdaus (Sekertaris) - Syamsul Bahri (Bedahara)	L L L	25 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
2.	Kecamatan Sinjai Barat 1. Tassillilu	UED-SP Tassillilu	- Hasnah (Ketua) - Marwah Asnawi (Bendahara)	P P	12 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
		UED-SP Lestari	- Nurcaya (Ketua) - Nurzakiayah (Bendahara)	P P	3 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Terasa	UED-SP Terasa	- Saming (Ketua) - A .Baso (Sekertaris) - A .Tendriwati (Bendahara)	L L P	20 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
3.	Kecamatan Tellulimpoe 1. Bua	UED-SP Bahagia	- Lanco (Ketua) - Mustafa (Sekertaris) - Maemunah (Bendahara)	L L P	20 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)

4.	Kecamatan Sinjai Borong 1. Bonto Sinala	UED-SP Sipatuo	- ABD. Rajab (Ketua) - Mappanyukki (Sekertaris) - Nurhayati (Bendahara)	L L P	150 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
5.	Kecamatan Sinjai Utara 1. Bongki	UED-SP Cenning Atie	- Andi Ashari, S.sos (Ketua). - Megawati (Sekertaris) - Warda (Bendahara)	L P P	29 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	2. Alewanuae	UED-SP Assamaturuseng	- Saifuddin, A.Md (Ketua) - Rosmina (Sekertaris) - Sinarwati (Bendahara)	L P P	13 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	3. Biringere	UED-SP Topekkong	- Muh.Natsir, S.Ag (Ketua) - Fattah (Sekertaris) - Ami (Bendahara)	L L P	5 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	4. Lappa	UED-SP Bahari Topekkong	- S u a r d i. P (Ketua) - M. Rafi (Sekertaris) - Hastuti Irmayanti (Bendahara)	L L P	19 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
	5. Lamatti Rilau	UED-SP Lamatti	- Awaluddin S.IP (Ketua) - Hariani Alwi, SE - Sukamawati, SE	L P P	4 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)

	6. Balangnipa	UED-SP Benteng Balangnipa	- Agussalim (Ketua) - Hikmah (Sekertaris) - Sumarni (Bendahara)	L P P	15 Orang	Aktif (Belum Berbadan Hukum)
6	Kecamatan Sinjai Timur 1. Pasimarannu	UED-SP Pasimarannu				
Jumlah				L = 17 Orang P = 20 Orang	335 Orang	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

Chor

**DATA KELOMPOK BINAAN PNPM-MP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA PENGURUS UPK PNPM-MP	L/P	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	Sinjai Tengah	Ketua : Sainal Bendahara : Rizki, S.E	L L	30	890	Aktif
2	Sinjai Barat	Ketua : Sukmawati, SE Bendahara : Jamila, SE	P P	25	800	Aktif
3	Bulupoddo	Ketua : Azikin, S.Pdi Bendahara : Syamsiah Mungkar, S.Ag	L P	40	620	Aktif
4	Pulau Sembilan	Ketua : Rusman, S.S.T.Ars Bendahara : Wahyu	L L	18	450	Aktif
5	Sinjai Selatan	Ketua : Slamet Riyadi Bendahara : Aprianto	L L	23	390	Aktif
6	Tellulimpoe	Ketua : Muzakkir, SE Bendahara : Sitti Aisyah	L P	36	490	Aktif
7	Sinjai Timur	Ketua : M. Darwis T Bendahara : Abdul Hamid, S.Pd. SD	L L	15	410	Aktif

8	Sinjai Borong	Ketua : Nurul Ilmi Jaya, S.Pd Bendahara : Asrina, SE	P P	29	420	Aktif
Jumlah			L = 10 Orang P = 6 Orang	216	4.050	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Panglima Pembina Utama Muda
NIP. 19611103 198408 1 001

**INVENTARIS LKM YANG BELUM BERBADAN HUKUM
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	NAMA LKM	TAHUN PENDIRIAN	JENIS LKM	JUMLAH NASABAH		ALAMAT LKM				KEGIATAN USAHA				CAKUPAN WILAYAH				
				PENJAMAH	PENYIMPAN	DESA/KEL	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROV	SIMPANAN	PINJAMAN	KONSULTAN	LAIN-LAIN	DESA/KEL	KECAMATAN	KAB/KOTA	PROV	LEBIH DARI 1 PROV
1	UED-SP Tassillilu	1997			1	Kel. Tassillilu	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Tassillilu	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
2	UED-SP Gunung Perak	1997			1	Gunung Perak	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Gunung Perak	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
3	UED-SP Sipatuo	1997			1	Bonto Sinala	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bonto Sinala	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
4	UED-SP Pasimarannu	1997			1	Pasimarannu	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Pasimarannu	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
5	UED-SP Cenning Atie	1997			1	Bongki	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bongki	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	
6	UED-SP Topekkong	1997			1	Biringere	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Biringere	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	
7	UED-SP Bahari Topekkong	1997			1	Lappa	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Lappa	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	
8	UED-SP Lamatti	1997			1	Lamatti Rilau	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Lamatti Rilau	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	
9	UED-SP Benteng Balangnipa	1997			1	Balangnipa	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Balangnipa	S. Utara	Sinjai	Sul-Sel	
1	UPK PNPM-MP	2008		3	1	Bonto Salama	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bonto Salama	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
2	UPK PNPM-MP	2008		3	1	Gunung Perak	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Gunung Perak	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
3	UPK PNPM-MP	2008		10	1	Barania	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Barania	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
4	UPK PNPM-MP	2008		4	1	Arabika	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Arabika	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
5	UPK PNPM-MP	2008		5	1	Kel. Tassillilu	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Tassillilu	S. Barat	Sinjai	Sul-Sel	
6	UPK PNPM-MP	2007		7	1	Kel. Mannanti	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Mannanti	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
7	UPK PNPM-MP	2007		4	1	Lembang Lohe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Lembang Lohe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
8	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Massaile	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Massaile	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
9	UPK PNPM-MP	2007		1	1	Saotengah	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Saotengah	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
10	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Kalobba	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kalobba	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
11	UPK PNPM-MP	2007		4	1	Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
12	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Era Baru	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	

13	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Bua	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
14	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Pattongko	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
15	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Sukamaju	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
16	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Samaturue	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tellulimpoe	Tellulimpoe	Sinjai	Sul-Sel	
17	UPK PNPM-MP	2007		11	1	Kel. Pasir Putih	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Pasir Putih	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
18	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Kassibuleng	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kassibuleng	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
19	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Batu Belerang	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Batu Belerang	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
20	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Bonto Sinala	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bonto Sinala	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
21	UPK PNPM-MP	2007		5	1	Biji Nangka	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Biji Nangka	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
22	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Bontotengnga	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bontotengnga	S. Borong	Sinjai	Sul-Sel	
23	UPK PNPM-MP	2008		2	1	Salohe	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Salohe	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
24	UPK PNPM-MP	2008		1	1	Saukang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Saukang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
25	UPK PNPM-MP	2008		2	1	Panaikang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Panaikang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
26	UPK PNPM-MP	2008		3	1	Sanjai	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Sanjai	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
27	UPK PNPM-MP	2008		1	1	Patalassang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Patalassang	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
28	UPK PNPM-MP	2008		4	1	Kel. Samataring	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Samataring	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
29	UPK PNPM-MP	2008		2	1	Tongke-Tongke	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Tongke-Tongke	S. Timur	Sinjai	Sul-Sel	
30	UPK PNPM-MP	2008		1	1	Talle	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Talle	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	
31	UPK PNPM-MP	2008		1	1	Aska	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Aska	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	
32	UPK PNPM-MP	2008		1	1	Palae	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Aska	S. Selatan	Sinjai	Sul-Sel	
33	UPK PNPM-MP	2008		4	1	P. Padaelo	P. Sembilan	Sinjai	Sul-Sel	√	√			P. Padaelo	P. Sembilan	Sinjai	Sul-Sel	
34	UPK PNPM-MP	2008		6	1	P. Buhung Pitue	P. Sembilan	Sinjai	Sul-Sel	√	√			P. Buhung Pitue	P. Sembilan	Sinjai	Sul-Sel	
35	UPK PNPM-MP	2007		4	1	Kel. Samaenre	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kel. Samaenre	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	
36	UPK PNPM-MP	2007		4	1	Kanrung	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kanrung	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	
37	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Baru	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Baru	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	
38	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Saotengnga	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Saotengnga	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	
39	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Bonto	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Bonto	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	
40	UPK PNPM-MP	2007		8	1	Pattongko	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Pattongko	S. Tengah	Sinjai	Sul-Sel	

41	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Kompang	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Kompang	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel
42	UPK PNPM-MP	2007		4	1	Saohiring	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Saohiring	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel
43	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Mattunrengtelle	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Mattunrengtelle	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel
44	UPK PNPM-MP	2007		3	1	Gantarang	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Gantarang	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel
45	UPK PNPM-MP	2007		2	1	Saotanre	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Saotanre	S.Tengah	Sinjai	Sul-Sel
46	UPK PNPM-MP	2007		1	1	Lamatti Riattang	Bulipoddo	Sinjai	Sul-Sel	√	√			Lamatti Riattang	Bulipoddo	Sinjai	Sul-Sel

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP
Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19611103 198408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Lingk. Tanassang Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai

CAKUPAN MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH MASYARAKAT YANG MELAKUKAN GOTONG ROYONG	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	PULAU SEMBILAN	4.962	7.659	64,79
2	BULUPODDO	10.121	17.852	56,69
3	SINJAI BORONG	10.233	17.748	57,66
4	SINJAI BARAT	19.652	25.252	77,82
5	SINJAI SELATAN	29.982	42.382	70,74
6	SINJAI TENGAH	15.968	28.842	55,36
7	SINJAI TIMUR	16.729	33.851	49,42
8	TELLULIMPOE	16.973	37.153	45,68
9	SINJAI UTARA	32.868	51.642	63,65
	JUMLAH	157.488	262.381	60,02

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PMD SINJAI



A. ZAINAL ARIFIN NUR, S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19611103 198408 1 001

**DATA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG DIKEMBANGKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2014 - 2018**

NO	NAMA KELOMPOK	TAHUN TERBENTUK	ALAMAT DESA/KECAMATAN	JENIS ALAT	JUMLAH	KET.
1.	Kelompok Tani Al Iman	2010	Palae/Sinjai Selatan	Alat Pemanen Padi	1 Unit	
2.	Kelompok Wanita Tani	2011	Desa Saotengah/Tellulimpoe	Pembuatan Permen Manisan Buah	1 Paket	
3.	Kelompok Tani Data I	2013	Desa Tompobulu/Bulupoddo	Alat Pengering Kakao	1 Unit	
4.	Kelompok Usaha Bersama Sukamaju	2013	Arabika/Sinjai Barat	Mesin Spiner (Alat pengering kripik)	1 Unit	
5.	Kelompok Wirausaha Sapo Tinggi Art and Craft	2014	Biringere/Sinjai Utara	- Alat mesin Lasting - Tabung gas argon	1 Unit	
6.	Kelompok Tani KPK Sipakainge	2014	Desa Pasimarannu/Sinjai Timur	Pengelolaan Minyak Goreng Ber-VCO	1 Paket	
7.	Desa Terasa	2015	Desa Terasa/Sinjai Barat	Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTHM)	1 Paket	

8.	KUB Samaturue	2015	Bontosalama/Sinjai Barat	Alat Pemasak/Gula Aren/Wajan	2 Buah	
9.	Wartek Mawar	2015	Duampanuae/Bulupoddo	Alat Pemipil Jagung	1 Unit	
10	Desa Palangka	2016	Desa Palangka Sinjai Selatan	Alat Pencaca Pakan Ternak	1 Unit	
11	Wartek Balla Pale	2016	Batu Belerang/Sinjai Borong	Alat Pengering Kakao	1 Unit	
12	Desa Palangka	2016	Desa Pelangka/Sinjai Selatan	Alat Pembuatan Gula Semut Aren	1 Unit	
13	Wartek Massenge	2016	Desa Lamatti Riaja	Alat Pencaca pakan Ternak	1 Unit	
14	Wartek Massenge	2016	Desa Lamatti Riaja	Alat Pemanen Padi	1 Unit	

Mengetahui,

Kepala Dinas PMD Kab. Sinjai



A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19611103 198408 1 001